I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dan semua mahluk hidup butuh air. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Air pula merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, tumbuhan dan binatang yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan unsur yang vital dan sumber kehidupan mahluk hidup di bumi.

Air adalah zat yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk yang berada di bumi. Sekitar 71 % bumi mengandung air dan tubuh manusia juga mengandung air sekitar 80 %. Seluruh makhluk hidup di muka bumi ini sangat tergantung dengan air. Air memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang kehidupan manusia dalam berbagai bidang misalnya; bidang pertanian, industri, perikanan, tenaga listrik, pariwisata dan sebagainya. (“Lingkungan Hidup” http://www.artikellingkunganhidup.com/fungsi-dan-peran-air-bagi-kehidupan-manusia.html. diakses 20 April 2014 pukul 17:35 WIB)

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Peningkatan tersebut dilihat dari dua hal yang saling tergantung satu sama lain yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas bau, warna dan rasa, kualitas kimia yang terdiri atas pH air, dan lain-lainnya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikro organisme penyebab penyakit. Sedangkan dari segi kuantitas airnya yakni air juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu.

Rohcili (2006: 15) menyatakan jumlah air relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumber daya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, ada sebagian penduduk kurang mendapatkan pelayanan air, tetapi di sisi lain terdapat aktivitas dan kegiatan penduduk yang menggunakan air secara berlebihan dan cenderung memerlukan pemborosan air. Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup temasuk air tanah.

Menurut Sunaryo (2005: 44) air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia.

Tujuan penyelenggaraan negara antara lain untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan rakyat dan menciptakan keadilan. Penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik (*ownership*), tetapi tetap pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling hakiki, termasuk manusia, tanaman dan hewan, oleh sebab itu air perlu ditata penggunaannya agar memberikan manfaat bagi rakyatnya. Dalam jaringan distribusi air, diperlukan suatu sistem yang terkoordinasi, baik antara para pelaku maupun pembuat kebijakan di sektor perairan, dan jaminan perolehan air yang cukup agar dapat memenuhi semua kebutuhan air yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup.

Pentingnya masalah air, baik untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak maupun untuk kebutuhan pertanian (terutama tanaman pangan) dan keperluan pada sektor lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi suatu komoditas yang memiliki posisi strategis dari kepentingan-kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup, bisnis, industri, pertanian/irigasi, maupun ketahanan pangan yang menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional. Posisi air yang strategis dalam menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak dapat dielakkan bahwa air akan menjadi persoalan tarik menarik dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, persoalan air harus ditata dengan

baik melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan mewujudkan ketertiban umum yang mencerminkan keadilan masyarakat.

Masalah kekurangan air telah menimpa banyak tempat di dunia. Pada tahun 2025, 1,8 miliar orang akan tinggal di negara atau wilayah dengan kelangkaan air yang nyata dan dua-pertiga dalam kondisi tekanan kekurangan air. Sementara sekitar 70% air tawar yang tersedia digunakan untuk pertanian, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga. PBB memperkirakan bahwa setiap orang membutuhkan sekitar 50-100 liter per hari untuk minum, memasak dan mencuci. Namun di negara termiskin penduduk hidup dengan hanya dengan 10 liter sehari. (http://www.unilever.co.id/id/sustainable-living/water/#108-284838. Diakses 20 April 2014 pukul 18:17)

Menurut Kodoatie (2008: 2) air merupakan bagian dari sumber daya alam sekaligus juga sebagai bagian dari ekosistem. Kuantitas dan kualitasnya pada lokasi dan waktu tertentu tergantung dan terpengaruh oleh berbagai hal, berbagai kepentingan dan berbagai tujuan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, berbagai persoalan yang terkait dengan air atau sumber daya air telah dan terus berlangsung. Ketersediaan air cenderung menurun namun dilain pihak kebutuhan air semaki meningkat.

Trisnawulan, (2007: 115) pencemaran dan penurunan kualitas air tanah berhubungan erat dengan tingkat kepadatan penduduk, sebab semakin banyak jumlah penduduk maka limbah yang dibuang ke lingkungan akan semakin besar. Selain itu kegiatan industri juga memberi andil yang cukup besar terhadap penurunan kualitas air.

Air merupakan karunia Tuhan untuk manusia, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diamanatkan bahwa "Penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat."

Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap individu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Apabila terjadi pengurangan kuantitas maupun kualitas sumber daya air maka akan mempengaruhi kehidupan manusia secara bermakna. Untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air ini, maka pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab kesejahteraan warga negaranya, berkewajiban menetapkan suatu kebijakan atau undang - undang untuk mengatur sumber daya air.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah mengamanatkan bahwa setiap wilayah sungai diharuskan memiliki pola pengelolaan sumber daya air.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 merupakan salah satu Undang-Undang yang dibuat untuk mengaturnya. Secara umum Undang-Undang tersebut terdiri atas delapan belas bab, yang sebagian besar membahas tentang ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, konservasi sumber daya air, Pendayagunaan sumber daya air, dan Pengendalian daya rusak air. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945

pasal 33, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air, dimana menyangkut hajat hidup orang bayak, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan penanganan integral yang mengarahkan kita dri pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Pola pengelolaan sumber daya air menurut Global Water Pathernship dalam Kodoatie (2008: 220) adalah Suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok atau tepat tanpa menganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting yang terkandung di dalamnya.

Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

Bali mempunyai sistem Irigasi Subak yang terletak di Pura Bedugul. Sistem irigasi ini diatur oleh Pemuka adat setempat yang juga seorang petani. Pola pengelolaan pembagian air di Subak bali ini yakni dibagikan secara merata keseluruh jaringan irigasi melalui pintu-pintu yang sudah ditentukan lebar ambang daun pintu sesuai dengan kebutuhan lahan sawah yang akan di aliri. Dalam subak, juga harus memiliki 1 bangunan bagi serta pura yang terpasang

di pematang masing- masing sawah. Di Subak hanya mengandalkan sungai (kestabilan debit air).

Sekampung sistem merupakan nama sebuah daerah irigasi yang merupakan gabungan dari beberapa daerah irigasi. Bendung pusat dari Sekampung Sistem ini berada di Lampung Selatan yang bersumber dari sungai Way Sekampung yang bernama Bendung Argo Guruh. Bendung tersebut dibangun sejak 1935. Daerah irigasi yang dialiri terdiri dari:

1. Daerah irigasi Punggur Utara
2. Daerah irigasi Sekampung Bunut
3. Daerah irigasi Batanghari
4. Daerah irigasi Raman Utara
5. Daerah irigasi Batanghari Utara

Sekampung Sistem ini memiliki luas areal yakni 76,006 Hektar yang terdiri dari 2 saluran induk yakni Fider Kanal satu dan Fider Kanal dua. Di lihat dari luasnya cangkupan daerah irigasi Sekampung Sistem ini maka kebutuhan air yang untuk memenuhi kebutuhan air untuk semua sektor terutama di sektor pertanian cukup banyak.

Sistem irigasi di Sekampung Sistem ini di tetapkan oleh Komisi Irigasi (BPSDA). Pola pengelolaan pembagian air di Sekampung Sistem ini menggunakan aturan pembagian golongan 1 – 6. Penggunaan golongan ini di karenakan pembagian air tidak bisa dialirkan secara serentak di semua

jaringan irigasi dengan pertimbangan ketersediaan air terbatas dan luasnya hamparan sawah yang akan di aliri.

Tabel 1.1 : Air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air pada daerah irigasi Sekampung Sistem yaitu:

Tahun	Kebutuhan Debit Air	Debit Air Yang Tersedia
2009	1.140.685,70 m^3	1.140.685,92 m^3
2010	1.140.686,52 m^3	1.140.671,13 m^3
2011	1.141.688,11 m^3	1.140.667,48 m^3
2012	1.141.702,23 m^3	1.141.635,37 m^3
2013	1.141.712,55 m^3	1.141.713,06 m^3

Sumber: UPTD Balai PSDA kota Metro, diolah januari 2014

Kurangnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air dalam sektor pertanian pada daerah irigasi di Sekampung-Sistem yang berarti di sekitar areal persawahan tersebut akan tampak pecah-pecah dan tanaman padi akan tampak menguning namun kekeringan tersebut bukan karena tiba masa panen, sehingga mengakibatkan gagal panen pada musim tanam yang telah ditetapkan. Dengan kata lain apabila terjadi gagal panen maka mengakibatkan kerugian bagi masyarakat petani dan lingkungannya yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar PBB, melonjaknya harga beras, menurunnya hasil panen, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakatnya.

Selama kekurangan air berlangsung maka petani tidak dapat mengoptimalkan penggarapan sawah dan ladang kebun di desanya karena kekurangan air tersebut. Dampaknya yakni ketidakmaksimalan hasil sawah dan ladangnya sehingga menimbulkan keanjlokan harga komoditi tersebut dan secara tidak langsung berkurangnya pemasukan untuk penghidupan para petani.

Dampak pemanasan global merupakan penyebab dari kurangnya debit air dan musim kemarau yang semakin panjang dan sebaliknya musim penghujan akan semakin pendek namun intensitas hujan lebih besar. Akibatnya pada musim kemarau dibanyak daerah kekeringan menjadi semakin lama dan persoalan defisit air menjadi semakin komplek. Musim penghujan menjadi semakin pendek namun intensitas hujan meningkat. Akibatnya pada musim kemarau cadangan air dari musim penghujan menjadi lebih sedikit yang akan memperparah kurangnya debit air yang sudah ada. Berikut penyebab atau masalah kekurangan air yang terjadi di daerah Irigasi Sekampung Sistem:

Tabel 1.2 : Penyebab kekurangan air yang terjadi di daerah Irigasi Sekampung Sistem:

No	Penyebab kekurangan	Alasan mengapa Prioritas
1.	Bangunan	a. Rusaknya plang pintu air b. Pemeliharaan bangunan yang kurang memadai
2.	Saluran	a. Jebolnya saluran b. Konstruksi saluran yang rapuh c. Rusaknya Saluran yang diakibatkan oleh grogotan binatang liar d. Terjadi penyumbatan pada saluran
3.	Sungai	a. Aliran sungai kecil terutama pada musim gadu yan terjadi pada bulan april – september b. Kurangnya sumber air yang berasal dari sungai way sekampung c. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang
4.	Aliran	a. Dirusaknya pintu air b. Dirusaknya aliran saluran c. Menyedot aliran dengan pompa d. Pencurian aliran air
5.	Petani	a. Tidak disiplinnya pengambilan golongan air diantara golongan tersebut b. Tidak disiplinnya petani dengan jadwal tanam atau pola tanam yang telah

		ditetapkan
6.	Alam	a. Tidak menentunya curah hujan b. Gundulnya hutan yang mengakibatkan resapan air berkurang

sumber: Buku panduan UPTD BPSDA Wilayah II Metro

Berdasarkan tabel diatas, salah satu penyebab terjadinya kekurangan air di daerah irigasi Sekampung-Sistem ini adalah dari faktor masyarakatnya yang tidak disiplin dalam pengangambilan golongan air diantara golongannya, terjadinya pencurian air, di rusaknya plang pintu air dan lain-lain yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan yang lain sehingga terjadinya kekurangan air itu pun terjadi.

Sebagai bentuk implementasi penanggulangan kekurangan air yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah untuk masyarakat dari ancaman kekurangan air yang terjadi adalah dengan membuat program/kegiatan pencegahan. Peran kantor UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Seputih – Sekampung yang bertempat di Kota Metro adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang menangani Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Lingkungan Satuan Wilayah Sungai Seputih Sekampung yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota.

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Seputih – Sekampung terbentuk berdasarkan : Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, Tanggal 23 Desember 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Selanjutnya ditetapkan kembali melalui SK Gubernur Nomor : 03 Tahun 2001 tanggal 09 Desember 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Lampung.

Dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang bertempat di kota Metro ini kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air kota Metro melakukan upaya dan langkah-langkah dalam bentuk kegiatan serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan dari tahun 2009-2013. Kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang pengelolaan air yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air kota Metro.

Tabel 1.3 : Data Curah Hujan pada Daerah Irigasi Sekampung Sistem

No	Tahun	Jumlah Curah Hujan Per Tahun
1.	2009	1.567 mm
2.	2010	2.610 mm
3.	2011	1.607 mm
4.	2012	1.009 mm
5.	2013	2.248 mm

Sumber: Data Hidrologi UPTD BPSDA Wilayah II.

Pada tahun 2012 diadakan penentuan sistem gilir dikarenakan ditahun tersebut terjadi kekurangan air sekitar 16,86 m3. Penyebab dari kekurangan air menurut Imron Junet selaku pelaksana O&P di UPTD balai PSDA wilayah II Metro dalam yakni curah hujan yang kurang bahkan tidak menentu dan rusaknya plang pintu air penyebab dari kekurangan air tersebut. Apabila terjadi kekurangan air maka yang dilakukan adalah meminta kiriman atau

suplay air dari bendungan atau waduk Batu Tegi ke Bendung Argo Buruh (wawancara, 12 januari 2014).

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Metro telah melakukan upaya untuk meminimalisir kekurangan air di Kota Metro. Formulasi kebijakan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Metro terutama diupayakan untuk dapat aspiratif dan dapat memberikan solusi terbaik untuk masyarakat pada umumnya. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan dapat lebih mengarah pada kepentingan publik, maka kebijakan harus disusun berdasarkan masalah-masalah yang timbul dimasyarakat.

Persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat seperti yang telah disebutkan diatas tentu saja membutuhkan penanganan yang sangat serius dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah diharapkan memiliki komitmen dan strategi khusus yang difokuskan untuk memecahkan masalah kekurangan air ini, yaitu melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Metro Berdasarkan uraian di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai Model tata kelola air UPTD Balai PSDA wilayah II Metro dalam menanggulangi kekurangan air pada daerah irigasi Sekampung Sistem.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah pelaksanaan manajemen POAC UPTD Balai PSDA wilayah II Metro dalam menanggulangi kekurangan air pada daerah irigasi Sekampung Sistem?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan manajemen POAC UPTD Balai PSDA wilayah II Metro dalam mengatasi kekurangan air pada daerah irigasi Sekampung Sistem.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen POAC Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kota Metro Dalam Menanggulangi Kekurangan Air di Daerah Irigasi Sekampung Sistem. Serta diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa maupun umum untuk menambah ilmu pengetahuan.